

## PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM RANTAI DISTRIBUSI BBM: STUDI KASUS OPLOSAN PERTALITE

**Chantika Trie Andini <sup>1</sup>, Rifky Maolana <sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen,  
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Correspondence		
Email:	No. Telp:	
Submitted 5 Juni 2025	Accepted 8 Juni 2025	Published 9 Juni 2025

### ABSTRAK

Distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan salah satu program strategis pemerintah Indonesia dalam menjamin akses energi yang adil dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah. Namun, dalam pelaksanaannya, distribusi BBM bersubsidi kerap disalahgunakan oleh oknum yang memiliki kewenangan baik dari internal Pertamina, maupun mitra distribusi lainnya. Praktik penyalahgunaan tersebut mencakup pengoplosan BBM subsidi dengan BBM non-subsidi seperti kasus pertalite, manipulasi data distribusi, hingga kerja sama ilegal antara petugas distribusi dan pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dampaknya sangat merugikan mulai dari kebocoran anggaran negara, kerusakan kendaraan akibat BBM oplosan penurunan kualitas pelayanan publik hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga distribusi energi. Pengoplosan ilegal juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen sekunder untuk mengidentifikasi pola penyimpangan, menganalisis akar masalah seperti lemahnya sistem pengawasan, disparitas harga BBM rendahnya integritas pengelola distribusi. Hasil analisis menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh melalui digitalisasi sistem distribusi, peningkatan transparansi, penegakan hukum yang tegas, dan pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan. Rekomendasi kebijakan yang diajukan diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam membangun sistem distribusi BBM bersubsidi yang lebih akuntabel, efisien, dan tepat sasaran.

**Kata Kunci:** *BBM Bersubsidi, Penyalahgunaan Wewenang, Distribusi Tidak Merata, Keadilan Ekonomi, Transparansi, SPBU, Kebijakan Publik*

### ABSTRACT

The distribution of subsidized fuel (BBM) is one of the Indonesian government's strategic programs aimed at ensuring fair and affordable energy access for low- to middle-income communities. However, in practice, the distribution of subsidized fuel is often misused by individuals with authority, both from within Pertamina and its distribution partners. These abuses include mixing subsidized fuel with non-subsidized fuel such as in the case of Peralite manipulating distribution data, and engaging in illegal collaborations between distribution personnel and third parties for personal gain. The impact is highly detrimental, leading to state budget leaks, vehicle damage due to adulterated fuel, a decline in public service quality, and reduced public trust in the government and energy distribution institutions. Illegal fuel mixing also poses a serious threat to the environment. This study employs a qualitative descriptive method through literature review and secondary document analysis to identify patterns of misconduct and analyze root causes such as weak oversight systems, fuel price disparities, and low integrity among distribution managers. The analysis reveals an urgent need for comprehensive reform through digitalization of the distribution system, increased transparency, strict law enforcement, and active community involvement in oversight. The proposed policy recommendations are expected to serve as a reference for the government in developing a more accountable, efficient, and well-targeted subsidized fuel distribution system.

**Keywords:** *Subsidized Fuel, Abuse of Authority, Unequal Distribution, Economic Justice, Transparency, Gas Stations, Public Policy*

### PENDAHULUAN

Dalam beberapa waktu terakhir, publik dikejutkan oleh mencuatnya kasus dugaan pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melibatkan salah satu perusahaan besar milik negara, PT Pertamina Patra Niaga. Dugaan praktik curang ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara, tetapi juga menyisakan kekhawatiran besar terhadap dampaknya pada kendaraan bermotor yang menggunakan BBM tersebut. Kasus ini

membuka mata banyak pihak akan pentingnya pemahaman mendalam terkait kualitas bahan bakar, khususnya nilai oktan, serta bagaimana kualitas bahan bakar tersebut memengaruhi performa dan usia pakai mesin kendaraan.

Nilai oktan (octane number) merupakan salah satu indikator utama dalam menentukan mutu bahan bakar, yang berperan besar dalam mencegah terjadinya knocking atau detonasi pada mesin. Detonasi merupakan kondisi pembakaran yang terjadi tidak sesuai waktu yang semestinya dalam ruang bakar, dan dapat menyebabkan kerusakan serius pada komponen mesin. Oleh karena itu, pemilihan BBM dengan nilai oktan yang sesuai sangatlah penting guna menjaga efisiensi pembakaran serta kinerja mesin secara keseluruhan.

Praktik pengoplosan BBM, seperti mencampur Pertamina (RON 92) dengan bahan bakar beroktan lebih rendah seperti Premium (RON 88), dilakukan dengan tujuan menekan biaya produksi atau mencari keuntungan pribadi. Namun, Tindakan ini justru berpotensi menyebabkan berbagai permasalahan teknis, seperti penurunan performa kendaraan, peningkatan emisi gas buang, kerusakan mesin, hingga penumpukan kerak pada ruang bakar. Selain itu, dampaknya juga bisa meluas ke aspek lingkungan akibat peningkatan polusi udara, serta aspek ekonomi negara yang mengalami kerugian besar dari praktik kecurangan tersebut.

Kasus ini juga menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan baik dari pihak pemerintah, pelaku industri migas, hingga konsumen untuk lebih waspada terhadap peredaran BBM oplosan. Perlu adanya edukasi yang masif dan pengawasan ketat guna mencegah peredaran BBM yang tidak sesuai standar. Konsumen pun perlu dibekali pengetahuan tentang pentingnya memilih BBM yang sesuai dengan spesifikasi mesin kendaraan agar tidak dirugikan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari metode ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang dalam distribusi BBM bersubsidi serta dampaknya terhadap masyarakat dan negara, tanpa melakukan interaksi langsung dengan subjek penelitian.

Data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dan analisis dokumen sekunder, seperti laporan resmi pemerintah, data dari Pertamina, berita media massa, jurnal ilmiah, serta dokumen kebijakan publik terkait distribusi BBM bersubsidi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri berbagai bentuk penyalahgunaan dan ketimpangan distribusi berdasarkan sumber-sumber tertulis yang kredibel.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, melalui tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dianalisis untuk menemukan titik permasalahan serta hubungan antar variabel yang relevan, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan distribusi BBM bersubsidi dan implikasi kebijakan yang dapat diusulkan untuk mengatasinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis dari beberapa sumber seperti berita di media massa, dokumen resmi pemerintah, serta kajian akademik, ditemukan beberapa bentuk penyalahgunaan wewenang dalam distribusi BBM bersubsidi di Indonesia. Penyalahgunaan ini melibatkan oknum dari pihak SPBU, mitra distribusi hingga pengawasan internal perusahaan terkait.

### **Pengoplosan BBM Bersubsidi dengan BBM Non-subsidi**

Salah satu bentuk penyalahgunaan kewenangan yang paling umum dan merugikan dalam distribusi BBM bersubsidi adalah praktik pengoplosan antara BBM bersubsidi seperti Pertamina. Praktik ini dilakukan oleh oknum-oknum yang memiliki akses langsung terhadap distribusi BBM, terutama di tingkat SPBU dan agen penyalur. Pengoplosan BBM yaitu RON

90 atau bahkan di bawahnya, yaitu RON 88 yang di campur dengan RON 92 jadi tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya

Motivasi utama dari pengoplosan ini adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial secara instan dari selisih harga jual yang cukup tinggi antara BBM bersubsidi dan non-subsidi. BBM bersubsidi, karena harganya jauh lebih murah, dijadikan campuran untuk meningkatkan volume Pertamina secara tidak sah. Campuran ini kemudian dijual kepada konsumen dengan harga Pertamina murni, padahal kandungan bahan bakarnya telah tercampur dan kualitasnya menurun.

Praktik semacam ini sangat merugikan berbagai pihak. Negara mengalami kerugian karena BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan justru digunakan untuk kepentingan komersial ilegal. Dan konsumen dirugikan karena mendapatkan produk BBM yang tidak sesuai standar, yang bisa berdampak buruk pada performa kendaraan, mempercepat kerusakan mesin, dan meningkatkan biaya perawatan.

### **Kerugian Negara dan Konsumen Akibat Korupsi Pertamina**

Dalam kasus penyalahgunaan ini menyebabkan potensi kerugian negara yang cukup besar, kerugian tersebut sebesar Rp 193,7 triliun hanya dalam kurun waktu satu tahun. Menurut Center of Economic and Law Studies (Celios) kerugian di Tingkat konsumen juga tak kalah besar jumlahnya. Dalam hal ini konsumen membayar lebih mahal untuk BBM RON 92 namun sebenarnya berkualitas RON 90 karena terjadi pengoplosan yang seharusnya harganya lebih murah dibanding RON 92. Kerugian pada konsumen ini bisa mencapai Rp 47 miliar perhari akibat adanya pengoplosan tersebut. Jika dihitung pertahun bisa mencapai Rp 17,4 triliun.

Lebih dari itu, praktik semacam ini tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekonomi, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap kebijakan energi dan distribusi BBM nasional. Pengoplosan BBM juga dapat berdampak negatif terhadap performa mesin kendaraan konsumen, serta meningkatkan emisi yang berkontribusi pada pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap distribusi dan kualitas BBM perlu diperketat, dan pelaku penyalahgunaan harus ditindak tegas agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar di masa mendatang.

### **Dampak Negatif terhadap Masyarakat dan Negara**

Penyalahgunaan kewenangan dalam proses distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya melalui praktik ilegal seperti pengoplosan Pertamina, menimbulkan dampak yang sangat merugikan di berbagai aspek kehidupan. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat umum dan konsumen individu, tetapi juga memberikan konsekuensi serius terhadap stabilitas dan keberlangsungan ekonomi negara secara keseluruhan. Beberapa dampak signifikan yang dapat diidentifikasi antara lain:

#### **1. Kerugian Finansial**

Negara Penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk kepentingan komersial oleh pihak-pihak yang tidak berwenang menyebabkan terjadinya kebocoran anggaran negara dalam skala besar. Subsidi yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah justru disalahgunakan oleh oknum pelaku ekonomi ilegal. Kondisi ini tidak hanya mengurangi efektivitas kebijakan fiskal negara, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi. Kerugian fiskal tersebut berdampak pada terhambatnya pembangunan sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.

#### **2. Penurunan Kualitas BBM dan Risiko Kerusakan Kendaraan Konsumen**

BBM oplosan umumnya dicampur tanpa mengindahkan standar mutu dan keselamatan yang telah ditetapkan. Komposisi kimia yang tidak stabil serta tidak teruji secara laboratorium dapat menyebabkan kerusakan serius pada sistem pembakaran kendaraan, menyumbat injektor bahan bakar, dan mempercepat degradasi mesin. Dalam jangka panjang hal ini mengakibatkan penurunan performa kendaraan,

meningkatnya frekuensi dan biaya perawatan, serta berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan teknis yang mendadak. Dampak ini tentu merugikan konsumen secara ekonomi maupun keselamatan.

### **3. Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah dan Lembaga Distribusi Energi**

Maraknya praktik pengoplosan BBM yang tidak ditindak secara tegas dan transparan dapat merusak citra pemerintah di mata publik, khususnya terkait dengan kemampuan pengawasan dan penegakan hukum di sektor energi. Ketidaksiaran dalam menangani masalah ini menciptakan persepsi bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga terkait seperti Pertamina dan SPBU, tidak memiliki kontrol yang memadai terhadap distribusi energi yang vital bagi masyarakat. Ketidakpercayaan ini juga berimbas pada kredibilitas aparat pengawas yang dianggap tidak efisien, lalai, atau bahkan terlibat dalam praktik penyimpangan, yang pada gilirannya merusak kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan dan integritas lembaga negara.

### **4. Potensi Kerusakan Lingkungan yang Serius**

Proses pengoplosan BBM seringkali dilakukan secara ilegal di lokasi-lokasi tersembunyi yang tidak memperhatikan standar keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan hidup. Praktik ini berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang serius, seperti tumpahan BBM yang dapat mencemari tanah dan merusak ekosistem di sekitarnya. Selain itu, limbah kimia dari proses pengolahan yang tidak terkontrol dapat mencemari sumber air bersih, sementara pembakaran BBM yang tidak memenuhi standar emisi akan menghasilkan polusi udara yang berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Dampak lingkungan yang ditimbulkan sangat berbahaya khususnya jika terjadi di kawasan pemukiman padat atau dekat dengan sumber air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kerusakan ini tidak hanya merugikan masyarakat dalam jangka pendek tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang sulit diperbaiki dan akan membebani generasi mendatang.

#### **Analisis Pola dan Akar Permasalahan**

Berdasarkan hasil kajian mendalam dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi merupakan permasalahan yang kompleks dan sistemik. Masalah ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai kelemahan struktural dan kultural dalam sistem distribusi BBM. Adapun beberapa akar permasalahan utama yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut:

#### **1. Disparitas Harga BBM yang Tinggi**

Perbedaan harga yang signifikan antara BBM bersubsidi dan non-subsidi menciptakan peluang besar bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik ilegal seperti pengoplosan atau penyaluran BBM bersubsidi ke sektor yang seharusnya tidak berhak menerima. Insentif ekonomi yang tinggi dari selisih harga ini memicu motivasi kuat bagi individu atau kelompok tertentu untuk menyalahgunakan kewenangan distribusi demi meraih keuntungan pribadi. Hal ini menjadi faktor pemicu utama terjadinya kebocoran distribusi BBM bersubsidi.

#### **2. Sistem Pengawasan yang Masih Konvensional dan Tidak Efektif**

Saat ini sistem pengawasan terhadap distribusi BBM di berbagai wilayah masih dilakukan secara manual dengan minimnya pemanfaatan teknologi informasi, digitalisasi data, maupun sensorisasi otomatis. Ketergantungan pada pencatatan konvensional membuka celah besar bagi manipulasi laporan distribusi pemalsuan data, serta penghilangan jejak pelanggaran. Kurangnya sistem pelaporan berbasis waktu nyata juga memperlambat deteksi dini terhadap penyimpangan distribusi.

### 3. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

Distribusi BBM bersubsidi sering kali tidak disertai dengan keterbukaan data kepada publik maupun lembaga pengawas independen. Ketertutupan informasi ini menyebabkan sulitnya melakukan audit yang transparan dan menyeluruh. Rendahnya partisipasi publik dalam proses pengawasan juga memperbesar risiko terjadinya kolusi antara pelaku distribusi dengan oknum pengawas.

### 4. Rendahnya Integritas Moral dan Profesionalisme

Ditemukan bahwa sebagian pelaku distribusi dan petugas pengawas tidak menjalankan tugasnya secara profesional. Rendahnya etika kerja dan integritas moral menyebabkan terjadinya pembiaran atau bahkan keterlibatan langsung dalam praktik penyelewengan. Faktor ini mencerminkan lemahnya pembinaan karakter dan budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.

### 5. Minimnya Sanksi Tegas dan Lemahnya Penegakan Hukum

Ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku pelanggaran turut menjadi penyebab maraknya praktik penyalahgunaan. Dalam banyak kasus, hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kerugian negara atau masyarakat yang ditimbulkan, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Akibatnya, pelanggaran serupa cenderung berulang karena dianggap sebagai pelanggaran ringan yang risikonya kecil dibandingkan potensi keuntungan yang didapat.

## Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengatasi penyalahgunaan kewenangan dalam distribusi BBM bersubsidi pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang menyeluruh dengan menekankan pada empat aspek utama. modernisasi sistem, transparansi, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat.

**Pertama**, distribusi BBM harus didigitalisasi melalui pemasangan GPS pada armada distribusi penggunaan sensor volume digital di SPBU dan tangki penyimpanan, serta sistem pelaporan berbasis real-time yang terintegrasi dengan pusat data nasional guna mencegah manipulasi dan meningkatkan akurasi pengawasan.

**Kedua**, setiap SPBU dan agen penyalur wajib melaporkan data distribusi secara terbuka dan rutin diaudit oleh lembaga independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

**Ketiga**, perlu diterapkan sanksi hukum yang tegas dan tanpa toleransi bagi pelaku penyimpangan, baik individu maupun oknum aparat, dengan proses penegakan hukum yang cepat, adil, dan transparan untuk menciptakan efek jera. Keempat, masyarakat harus dilibatkan secara aktif melalui program edukasi yang menjelaskan ciri-ciri BBM oplosan dampaknya terhadap kendaraan dan lingkungan, serta pentingnya melaporkan pelanggaran melalui saluran pengaduan resmi. Dengan strategi terpadu ini, distribusi BBM bersubsidi dapat lebih terjaga dari penyimpangan, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang berhak.

## KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kasus dugaan pengoplosan BBM oleh PT Pertamina Patra Niaga merupakan bagian dari permasalahan yang lebih besar terkait penyalahgunaan wewenang dalam distribusi BBM bersubsidi di Indonesia. Praktik pengoplosan BBM tidak hanya menyebabkan penurunan kualitas bahan bakar yang merugikan konsumen dari sisi teknis, seperti kerusakan mesin dan peningkatan biaya perawatan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi negara dalam skala yang sangat besar. Selain itu, praktik ilegal ini berdampak langsung terhadap lingkungan melalui peningkatan emisi gas buang dan pencemaran akibat distribusi dan pembakaran bahan bakar yang tidak sesuai standar.

Berdasarkan analisis data sekunder, penyalahgunaan ini muncul akibat kelemahan struktural dan kultural, seperti disparitas harga BBM, lemahnya sistem pengawasan, kurangnya transparansi distribusi, rendahnya integritas pelaku, dan minimnya penegakan hukum.

Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, sementara masyarakat sebagai konsumen mengalami kerugian harian dalam bentuk harga BBM yang tidak sepadan dengan kualitas yang diperoleh.

Selain aspek ekonomi dan teknis, kasus ini juga menunjukkan penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga negara, khususnya dalam hal pengawasan distribusi energi. Hal ini mencerminkan bahwa ketidakseriusan dalam menindak pelanggaran justru membuka peluang berulangnya penyimpangan.

Oleh karena itu, upaya pembenahan perlu dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah harus menerapkan kebijakan berbasis teknologi melalui sistem digitalisasi dan pelaporan real-time, meningkatkan transparansi dengan keterbukaan data distribusi BBM, menerapkan sanksi hukum yang tegas dan efektif, serta melibatkan masyarakat dalam edukasi dan pelaporan. Selain itu, pembinaan moral dan integritas pelaku distribusi juga penting untuk membangun budaya kerja yang jujur dan bertanggung jawab.

Dengan langkah-langkah strategis yang terintegrasi tersebut, diharapkan distribusi BBM bersubsidi di Indonesia dapat berlangsung secara adil, efisien, tepat sasaran, dan terbebas dari praktik penyimpangan, sehingga mampu mendukung stabilitas ekonomi nasional serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang berhak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qohar. (2025, Februari 26). Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi Pertamina: Kejagung Periksa 8 Saksi. Tempo.co. <https://www.tempo.co/hukum/perjalanan-kasus-dugaan-korupsi-pertamina-kejagung-periksa-8-saksi--1216714>
- Tempo.co. (2015, April 30). Eksklusif: Ahok Blak-blakan Soal Modus Mafia Migas di Pertamina. <https://www.tempo.co/ekonomi/eksklusif-ahok-blak-blakan-soal-modus-mafia-migas-di-pertamina-652664>
- Hukumonline. (2024, Februari 27). Begini Modus Oplosan BBM dalam Kasus Korupsi Minyak Mentah. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-modus-oplosan-bbm-dalam-kasus-korupsi-minyak-mentah-lt67be950ce2a89/?page=2>
- Lampung Post. (2024). Skandal BBM Oplosan: Peralite Dimanipulasi Jadi Pertamina, Konsumen Dirugikan. [https://lampost.co/ekonomi-dan-bisnis/skandal-bbm-oplosan-pertalite-dimanipulasi-jadi-pertamax-konsumen-dirugikan/#goog\\_rewarded](https://lampost.co/ekonomi-dan-bisnis/skandal-bbm-oplosan-pertalite-dimanipulasi-jadi-pertamax-konsumen-dirugikan/#goog_rewarded)
- Kompas.com. (2025, Februari 27). Kasus Pertamina Oplosan Menuntut Transparansi dan Akuntabilitas. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/02/27/074924165/kasus-pertamax-oplosan-menuntut-transparansi-dan-akuntabilitas?amp=1&page=2>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2023). Korupsi Menghancurkan Harapan Kita Bersama. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/17406/Korupsi-Menghancurkan-Harapan-Kita-Bersama.html>
- Tempo.co. (2019). Infografis Kasus BBM Oplosan [Gambar]. [https://statik.tempo.co/data/2019/12/23/id\\_900075/900075\\_720.jpg](https://statik.tempo.co/data/2019/12/23/id_900075/900075_720.jpg)
- Pendidikan Sains FMIPA UNESA. (2024). Kasus BBM Oplosan Pertamina: Mengungkap Modus dan Dampak Nilai Oktan bagi Kendaraan. <https://pendidikan-sains.fmipa.unesa.ac.id/post/kasus-bbm-oplosan-pertamina-mengungkap-modus-dan-dampak-nilai-oktan-bagi-kendaraan>
- Tempo.co. (2024). 32 Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Jatim dan Sekitarnya Sejak Awal Tahun, Apa Modusnya? <https://www.tempo.co/ekonomi/32-kasus-penyalahgunaan-bbm-bersubsidi-di-jatim-dan-sekitarnya-sejak-awal-tahun-apa-modusnya--125546>